

SKRIPSI

**IMPLIKASI PERUBAHAN KEPEMIMPINAN DI AMERIKA SERIKAT
TERHADAP HUBUNGAN TRANSATLANTIK: STUDI KASUS PADA
ALIANSI NATO**



MUH RAIHAN ALIF

F0220516

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

MAJENE

2024

ABSTRAK

Perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat sering kali menghasilkan gelombang perubahan yang signifikan dalam dinamika hubungan transatlantik dengan Negara-negara Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sikap kepemimpinan AS terhadap hubungan transatlantik dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019-2023 dan untuk mengetahui implikasi perubahan kepemimpinan AS terhadap hubungan transatlantik dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019-2023. Konsep yang digunakan adalah Konsep Kebijakan luar negeri dan konsep aliansi yang menjadi elemen kunci dalam dinamika hubungan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data internet dan dokumen. Penelitian ini menggambarkan evolusi sikap dan kebijakan AS terhadap hubungan transatlantik selama periode tersebut dengan detail yang mendalam. Analisis yang cermat mengungkap pergeseran yang signifikan dalam pendekatan politik, ekonomi, dan keamanan AS terhadap Eropa. Implikasi dari perubahan ini sangatlah beragam dan meluas, mempengaruhi tidak hanya dinamika politik, tetapi juga struktur ekonomi, kestabilan keamanan, dan bahkan interaksi budaya di kedua sisi Atlantik. Dengan demikian, dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya memahami evolusi hubungan transatlantik dalam konteks lebih luas, yang mencakup perubahan sikap, kebijakan, dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan dan interaksi internasional.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Aliansi, Hubungan Transatlantik, Kebijakan Luar Negeri, NATO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) secara luas dianggap sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat muncul sebagai negara yang kuat Perekonomian, politik, dan militer semuanya sangat kuat, dan tidak mustahil bagi Amerika Serikat untuk menguasai dunia. Kredibilitas Amerika ditopang oleh peran pemerintah Setiap kebijakan negara diatur secara ketat oleh pemerintah AS, dan kedua kebijakan tersebut Kebijakan dalam dan luar negeri.¹

Negara berjuluk “Paman Sam” ini disegani dunia internasional. Seberapa kuat Kebijakan luar negeri Amerika Serikat didukung oleh kekuatan nasional Amerika Serikat. Amerika Serikat dikatakan sebagai negara yang berkomitmen untuk memenuhi komitmennya. kepentingan nasional dan membentuk tatanan geopolitik dunia. Amerika Serikat merupakan negara yang menarik perhatian dunia internasional. Khususnya mengenai agenda pemilu nasional.² Intinya, agenda pemilu nasional suatu negara bukan peristiwa global, tapi tidak berlaku pada pemilihan presiden kita. Pemilihan presiden di negara-negara adidaya utama dunia akan berdampak pada ketertiban Geopolitik dunia, termasuk munculnya gejolak

¹ Novita Mujiyati, Kuswono Kuswono, And Sunarjo Sunarjo, “United States During The Cold War 1945-1990,” *Historia* 4, no. 1 (February 28, 2016): 39, <https://doi.org/10.24127/hj.v4i1.481>.

² Program Studi et al., *Serikat Terhadap Proliferasi Nuklir Di Iran Pada Era Donald Trump Periode 2018-2019*, 2022.

politik global, telah menyebabkan Amerika Serikat khususnya memiliki hubungan yang tegang dengan negara-negara lain di dunia Islam. Amerika Serikat menerapkan sistem *Electoral College* dalam pemilihan presiden. Pemenang mengambil semuanya. Jadi, siapa pun yang memenangkan suara terbanyak tidak harus resmi. Presiden dipilih melalui *Electoral College*, yang dibentuk berdasarkan jumlah suara elektoral.³

Pada akhir tahun 2015, Amerika Serikat melakukan proses pemilihan presiden untuk menggantikan pemimpin sebelumnya yaitu Barrack Obama yang telah menjabat dua periode. Dari pemilihan yang terjadi akan menghadirkan perubahan konfigurasi politik internasional karena Amerika Serikat selalu mengalami perubahan kebijakan politik bila terjadi perpindahan kepemimpinan di Amerika Serikat. Konflik yang terjadi, dalam berbagai kebijakan Nasional Amerika Serikat selalu fokus pada Indikasi kekuatan militer mereka sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer yang paling kuat di dunia.

Kemenangan Donald Trump pada pemilu presiden tahun 2016 membayangi posisi Barack Obama sebelumnya sebagai presiden dan menandakan perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika. Sebelumnya, pada masa kepresidenan Barack Obama, kebijakan luar negeri di luar AS berkonsentrasi pada isu multilateralisme dan lebih menekankan soft power, yang mendorong kerja sama dan proses negosiasi dalam penyelesaian konflik. Selain itu, Obama berkomitmen untuk lebih waspada

³ Rendy Sueztra Canaldhy, Suandi Suandi, and Umi Purwanti, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (July 31, 2023): 47–63, <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3494>.

terhadap negara-negara Islam guna memperkuat persepsi Islam terhadap Amerika dan memitigasi dampak konflik kedua negara yang terjadi di kawasan Timur.

Kekuatan militer global, saat ini dikuasai oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Kekuatan militer yang sangat besar ini menciptakan ketidakstabilan Internasional apalagi adanya berbagai negara yang bertumbuh militernya karena peningkatan alutsista yang dimiliki oleh sebuah negara. Salah satu negara yang bertumbuh kekuatan yakni India dan Pakistan yang memiliki kekuatan militer yang besar karena peningkatan senjata Nuklir yang besar yang merubah keadaan dan dilema keamanan yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Dari berbagai dilema keamanan yang terjadi menghadirkan banyak kelompok kelompok aliansi militer.⁴

Aliansi militer yang terjadi memang sangat banyak hadir di dunia. Sejak perang dunia kedua hingga perang dingin kelompok kelompok Aliansi militer terus bertumbuh. Aliansi militer ini, dijadikan sebagai polarisasi keamanan militer dan kestabilan keamanan internasional agar tetap bertahan dalam internasional dan mempertahankan keberadaan sebuah negara di internasional.⁵

Aliansi NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) adalah sebuah organisasi pertahanan kolektif yang terdiri dari negara-negara anggota di

⁴ Amin, Khoiril. "Rivalitas dua raksasa asia: modernisasi militer Cina dan respons India." (2023).

⁵ Ramadhanti, Shabrina. Kepentingan Rusia Dalam Kerjasama Militer Dengan Pakistan Periode 2014-2017. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

wilayah atlantik utara. Amerika Serikat merupakan salah satu anggota pendiri dan mitra kunci dalam Aliansi NATO. Perubahan kepemimpinan Amerika Serikat memiliki potensi untuk mempengaruhi dinamika hubungan transatlantik, khususnya dalam konteks Kerjasama keamanan dan pertahanan di bawah payung NATO. Sejak berdirinya NATO Pada tahun 1949, Amerika Serikat telah memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Kawasan Atlantik Utara. Kepemimpinan Amerika Serikat dalam NATO melibatkan komitmen terhadap kebijakan luar negeri yang melindungi dan memperkuat hubungan dengan sekutu-transatlantiknya. Namun, dengan adanya perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat, baik itu dalam bentuk pergantian presiden atau perubahan partai politik yang berkuasa, dapat timbul implikasi yang signifikan terhadap hubungan transatlantik.⁶

Perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat sering kali diikuti dengan perubahan arah kebijakan luar negeri dan keamanan negara tersebut. Pergeseran fokus kebijakan, peninjauan ulang komitmen terhadap NATO, dan dinamika dalam Kerjasama militer dan operasional dapat terjadi sebagai hasil dari perubahan kepemimpinan tersebut. Misalnya, presiden baru mungkin memiliki prioritas dan kepentingan kebijakan yang berbeda, yang dapat mengubah tingkat keterlibatan dan kontribusi Amerika Serikat dalam NATO.⁷

⁶ Organization Nato, D I Bawah, and Kepemimpinan Presiden, "Masuknya Kembali Perancis Dalam North Atlantic Treaty Helmy Adi Sanjaya" 3, no. 1 (2015): 64–76.

⁷ Studi et al., *Serikat Terhadap Proliferasi Nuklir Di Iran Pada Era Donald Trump Periode 2018-2019*.

Selain itu, perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat juga dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan sekutu-transatlantik terhadap Amerika Serikat sebagai mitra strategis. Ketidakpastian politik yang muncul selama periode transisi kepemimpinan dapat menciptakan ketidakpastian dalam hubungan bilateral dan mengganggu Kerjasama dalam menghadapi tantangan keamanan bersama. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implikasi perubahan kepemimpinan Amerika Serikat terhadap hubungan transatlantik, dengan studi kasus pada Aliansi NATO.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak perubahan kepemimpinan tersebut, negara-negara anggota NATO dapat mengantisipasi dalam merespons perubahan tersebut secara efektif, memperkuat Kerjasama kolektif, dan menjaga stabilitas serta keamanan di kawasan transatlantik.

Implikasi perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat terhadap hubungan transatlantik adalah topik yang penting untuk diteliti atau diriset karena judul tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu menjelajahi dampak dari perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat terhadap hubungan transatlantik, dengan NATO sebagai studi kasus. Dengan menggunakan istilah “implikasi”, penelitian akan mengeksplorasi konsekuensi praktis dari perubahan kepemimpinan tersebut terhadap hubungan AS-Eropa, dengan fokus khusus pada dinamika di dalam NATO. Hal ini mencerminkan relevansi topik penelitian ini dalam konteks geopolitik global, serta potensi

kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang hubungan transatlantik dan dinamika aliansi militer multilateral seperti NATO. Hubungan antara Amerika Serikat dan Negara-negara di Eropa sangat penting dalam konteks politik, ekonomi, dan keamanan global. Perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat dapat memiliki dampak signifikan pada hubungan ini. Kepemimpinan baru di Amerika Serikat dapat membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri terkait hubungan transatlantik. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam pendekatan diplomasi, perdagangan, keamanan, dan kerjasama lintas batas.

Amerika Serikat adalah salah satu kekuatan global yang memiliki pengaruh besar dalam urusan dunia. Perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat dapat memiliki dampak yang luas dan signifikan pada hubungan transatlantik serta dinamika geopolitik global. Dengan mempelajari implikasi perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat terhadap hubungan transatlantik, kita dapat memahami lebih baik bagaimana perubahan politik di Amerika Serikat dapat mempengaruhi hubungan internasional yang penting ini.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Terpilihnya Joe Biden sebagai presiden telah menyebabkan perubahan dramatis dalam citra Amerika di dunia internasional. Sepanjang masa kepresidenan Donald Trump, masyarakat di seluruh dunia memandang rendah Amerika Serikat, dan sebagian besar

menentang kebijakan luar negerinya. Hal ini terutama terjadi di kalangan sekutu dan mitra utama Amerika. Kini, survei terbaru *Pew Research Center* terhadap 16 publik menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam peringkat AS, dengan dukungan kuat terhadap Biden dan beberapa inisiatif kebijakan utamanya. Dari 16 publik yang disurvei, lebih dari enam dari sepuluh publik mengatakan mereka percaya pada Biden untuk melakukan hal yang benar dalam urusan dunia. Namun dalam penulisan ini, peneliti hanya membatasi masalah dan berfokus bagaimana perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat mempengaruhi dinamika hubungan transatlantik dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019-2023.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perubahan sikap kepemimpinan Amerika Serikat terhadap hubungan Transatlantik dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019-2023?.
2. Bagaimana implikasi kepemimpinan Amerika Serikat dalam hubungan transatlantik dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ketika melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perubahan sikap kepemimpinan terhadap hubungan transatlantik dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019-2023.
- b. Untuk mengetahui implikasi kepemimpinan Amerika Serikat dalam hubungan transatlantik dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019-2023.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Akademis

Sebagai sumbangan hasil pemikiran dari Judul “Implikasi Perubahan Kepemimpinan Di Amerika Serikat Terhadap Hubungan Transatlantik: Studi Kasus Pada Aliansi NATO”

b. Praktis

Sebagai bahan pembelajaran tentang Judul “Implikasi Perubahan Kepemimpinan Di Amerika Serikat Terhadap Hubungan Transatlantik: Studi Kasus Pada Aliansi NATO”, di lingkup Studi Hubungan Internasional khususnya Di Universitas Sulawesi Barat.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah deskriptif. Tipe ini berfungsi menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi. ⁸Pendekatan ini akan menggambarkan bagaimana perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat telah memengaruhi hubungan transatlantik dan menjelaskan bagaimana hubungan transatlantik telah berubah seiring dengan perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat..

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu *Internet based research*. Dalam internet-based research, penelitian dapat dilakukan dengan analisis menyeluruh dari berbagai *platform* online seperti media sosial, situs web, forum, dan sumber-sumber elektronik lainnya, dengan menerapkan algoritma pencarian yang canggih serta teknologi pengambilan keputusan otomatis.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya atau berasal dari studi yang lebih dahulu diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya terkait perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat terhadap hubungan transatlantik. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti

⁸ Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian (AA Effendy). *Cipta Media Nusantara*. Hlm 6

jurnal, laporan, buku, telaah pustaka maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas penulis.

1.4.4 Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu teknik penelitian yang lebih menekankan pada proses penyimpulan melalui pendekatan deduktif dan induktif, dengan menggunakan logika.⁹ Teknik ini digunakan agar menghasilkan sebuah argument ilmiah yang tepat.

1.5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024-Mei 2024. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan perpustakaan FISIP. Ada juga data yang didapatkan dari website, buku yang sesuai dengan penelitian dan penambah referensi.

1.6. Sistematika Penyusunan Skripsi

Bab I : pada bab ini akan berisi tentang latar belakang sebagai pengantar dalam memaparkan isu yang akan dibahas dan diteliti, batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi

Bab II : pada bab ini akan berisi terkait telaah konseptual dan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian, konsep yang digunakan adalah konsep Kebijakan luar negeri dan konsep Aliansi yang nantinya akan membantu dalam penelitian ini.

⁹ Abdussamad, H. Z., & Sik M. S (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press Case Hal. 29

Bab III : pada bab ini berisi gambaran umum Hubungan Transatlantik dan Aliansi NATO

Bab IV : pada bab ini memuat hasil dan pembahasan mengenai perubahan sikap kepemimpinan Amerika Serikat terhadap hubungan transatlantik dan implikasi kepemimpinan Amerika Serikat dalam hubungan Transatlantik.

Bab V : pada bab ini akan memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

DAFTAR PUSTAKA : Bagian akhir yakni berisi tentang daftar pustaka serta literatur penunjang untuk melengkapi pendataan di dalam proposal skripsi.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Konseptual

2.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri adalah serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur hubungan dan interaksi dengan negara-negara lain di dunia internasional. Rentang kebijakan ini meliputi berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, budaya, dan lingkungan.¹⁰ Kebijakan Luar Negeri merupakan instrumen penting bagi suatu negara dalam menjaga kepentingan nasionalnya dan mempromosikan tujuan-tujuan strategisnya di tingkat internasional.

Melalui kebijakan luar negeri, suatu negara dapat membangun dan memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menjalin kerja sama ekonomi, memperjuangkan hak-hak warganya di luar negeri, serta berpartisipasi dalam organisasi internasional.¹¹ Dalam bidang politik, kebijakan luar negeri mencakup upaya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra, menjaga stabilitas regional, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi

¹⁰ Purwanti, R. (2014). Evolusi dan Perkembangan Generasi Ketiga dalam Analisis Politik Luar Negeri. *Jurnal hubungan internasional*. Malang: Universitas Brawijaya.

¹¹ Lukman, M. Z. (2022). *Potensi Indonesia Pasca-Reformasi Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Perbandingan Kebijakan Luar Negeri) = Indonesia's Potential Post-Reform As A Non-Permanent Member Of The United Nations Security Council (The Comparative Study Of Foreign Policy)* Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.

manusia. Di bidang ekonomi, kebijakan luar negeri dapat berfokus pada pembukaan pasar, peningkatan kerja sama perdagangan, dan penarikan investasi asing. Dalam hal keamanan, kebijakan luar negeri dapat melibatkan kerja sama dalam penanggulangan terorisme, nonproliferasi senjata nuklir, dan penyelesaian konflik.

Selain itu, kebijakan luar negeri juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan luar negeri untuk mempromosikan budaya dan kepentingan nasionalnya, melindungi hak-hak warga negara di luar negeri, serta berpartisipasi dalam upaya global untuk menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Dengan demikian, kebijakan luar negeri merupakan instrumen penting bagi suatu negara dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain di dunia internasional. Melalui kebijakan ini, suatu negara dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya, membangun kerja sama, dan berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran global.¹²

Kebijakan luar negeri terkait dengan politik luar negeri. Menurut Miriam Budiarjo, politik luar negeri berfungsi sebagai kebijakan yang merupakan kumpulan keputusan yang ditetapkan oleh para pelaku atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Selain itu, politik luar negeri selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek eksternal dan

¹² Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241-256.

internal suatu negara yang membentuk kebijakan negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain di lingkup internasional. Dengan kata lain, politik luar negeri berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya tergantung pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh masing-masing negara.

Rosenau mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai langkah atau upaya pemerintah dalam mengambil tindakan untuk melindungi aspek-aspek penting di suatu negara dari pengaruh lingkungan internasional atau kebijakan yang dapat mengubah aspek yang tidak diinginkan. Rosenau menjelaskan bahwa ada tiga konsep dasar dalam memahami kebijakan luar negeri. Pertama, pengambilan kebijakan luar negeri harus didasarkan pada sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara. Semua hal ini dipengaruhi oleh pengalaman sejarah negara dan posisi strategis negara dalam politik internasional. Selain itu, dalam konsep kebijakan luar negeri yang dijelaskan oleh Rosenau,¹³terdapat tiga unit analisis kebijakan luar negeri, yaitu orientasi (*foreign Policy as a set of orientations*) komitmen dan rencana aksi (*Foreign policy as a set of commitments to and plans for action*) dan perilaku (*foreign policy as a form of behavior*).

Dalam teori yang diajukan oleh Rosenau, kebijakan luar negeri harus dipahami secara komprehensif dengan menggabungkan informasi dari berbagai tingkat analisis, mulai dari karakter pemimpin hingga sistem

¹³ Sadewa, D. P., Heryadi, D., & Hidayat, T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 89–103.

internasional. Menurut Rosenau, analisis kebijakan luar negeri berfokus pada kondisi-kondisi khusus yang dihadapi oleh suatu negara. Oleh karena itu, studi perbandingan diperlukan untuk memahami secara menyeluruh kebijakan luar negeri suatu negara. Terlebih lagi, dengan adanya ketergantungan antara dimensi nasional dan internasional, pemerintah dan aktor non-pemerintah dari suatu negara memiliki keterkaitan langsung dengan sistem internasional dalam berbagai hal tertentu.¹⁴ Dalam teorinya, Rosenau menjelaskan bahwa ada tiga jenis variabel dalam analisis hubungan luar negeri, yaitu variabel bebas (*independent variables*) terdiri dari faktor internal dan eksternal yang mendorong pembentukan kebijakan luar negeri suatu Negara; variabel yang mengintervensi (*intervening variables*) terdiri dari prosedur, kapabilitas, dan konflik antar-pembuat kebijakan; dan variabel terikat (*dependent variables*) terdiri dari ketetapan atau perubahan sikap internal dan eksternal terhadap kebijakan luar negeri.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, kebijakan luar negeri dapat mencakup upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif dan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.

Tujuan utama dari kebijakan luar negeri adalah untuk menjaga serta mempromosikan kepentingan nasional negara tersebut di level

¹⁴ Setiawan, A & Sulastri, E, (2017), *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta, UMJ Press

global, serta untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Kebijakan luar negeri juga memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara, meningkatkan posisi internasional, mengelola konflik dan krisis, mendorong perdamaian serta keamanan global, serta memperjuangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh negara tersebut.¹⁵ Proses pembuatan kebijakan luar negeri melibatkan analisis terhadap berbagai faktor seperti kepentingan nasional, kondisi politik dan ekonomi internasional, serta dinamika hubungan antarnegara. Tahap ini melibatkan berbagai institusi dan aktor di dalam pemerintahan, termasuk departemen luar negeri, lembaga keamanan, badan intelijen, dan terkadang juga masyarakat sipil serta sektor swasta.

Implementasi kebijakan luar negeri diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti diplomasi, perjanjian internasional, perdagangan internasional, bantuan pembangunan, dan diplomasi publik.¹⁶ Di beberapa situasi, tekanan politik atau militer juga digunakan oleh negara sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada. Konsep kebijakan luar negeri dapat dilihat dari beberapa pendapat pakar salah satunya Hans Morgenthau Seorang teoretisi realis dalam hubungan internasional,

¹⁵ Nugroho, R. (2022). Foreign Policy. Elex Media Komputindo.

¹⁶ Indrawati Indrawati and Agung Yudhistira Nugroho, "Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy]," *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 10, no. 20 (March 11, 2019): 14, <https://doi.org/10.19166/verity.v10i20.1462>.

Morgenthau memandang kebijakan luar negeri sebagai refleksi dari kepentingan nasional dan perjuangan kekuasaan antara negara-negara.¹⁷

2.1.2 Aliansi

Aliansi adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama. Aliansi ini dapat terbentuk antara individu, kelompok, institusi, atau negara. Dengan membentuk aliansi, pihak yang terlibat dapat saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Aliansi memiliki peran yang penting dalam hubungan antar negara, organisasi, maupun individu dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama.¹⁸ Aliansi dapat terbentuk dalam berbagai bidang, seperti aliansi militer, aliansi ekonomi, atau aliansi dalam permainan video. Contoh aliansi antarnegara termasuk SEATO (*Southeast Asia Treaty Organization*), NATO (*North Atlantic Treaty Organization*).

Konsep aliansi juga melibatkan berbagai prinsip, seperti saling percaya, kerjasama, ketergantungan, dan kewajiban untuk saling membantu dalam situasi tertentu.¹⁹ Terdapat juga konsep kekuatan bersama di mana anggota aliansi berkontribusi pada kekuatan kolektif aliansi, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan bersama atau untuk memberikan deterrence terhadap ancaman dari

¹⁷ Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (2010). Politik antarbangsa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹⁸ Mahanani, E. (2022). Book Chapter" Bisnis Internasional" Ch 7. Aliansi Strategis Internasional, Penerbit: CV. Media Sains Indonesia.

¹⁹ Ashari, K. (2020). Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi. Gramedia Pustaka Utama.

luar. Aliansi sering kali didasarkan pada kesadaran akan kepentingan bersama atau kesamaan dalam menghadapi ancaman tertentu. Namun, terkadang aliansi juga dapat muncul dari pertimbangan keuntungan individu, seperti peningkatan akses ke pasar atau sumber daya tertentu.

Dalam bisnis, aliansi strategis adalah kerjasama antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Aliansi strategis ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis masing-masing pihak agar menjadi lebih besar dan lancar. Contoh aliansi strategis dalam bisnis adalah kolaborasi antara perusahaan teknologi dengan perusahaan pemasaran untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Aliansi semacam ini memungkinkan perusahaan teknologi untuk memanfaatkan keahlian dalam teknologi mereka, sementara perusahaan pemasaran dapat memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan memperluas jangkauan bisnis mereka. Dengan bekerja sama, kedua pihak dapat saling memperkuat dan mencapai keunggulan bersama dalam industri yang kompetitif.²⁰

Dalam politik, aliansi adalah keterkaitan antar negara yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan politik, melindungi kepentingan bersama, atau mencapai tujuan politik tertentu. ²¹Aliansi politik dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk aliansi militer. Contohnya adalah NATO, sebuah aliansi pertahanan antara negara-negara Eropa dan

²⁰ Fiati, R., & Zuliyati, Z. (2016). Strategi Pengembangan Jaringan Usaha UMKM Pigura Kaligrafi Memasuki Pasar Ekspor. *Jurnal Dianmas*, 5(1).

²¹ Turmudi, E., & Sihbudi, M. R. (Eds.). (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Amerika Utara. NATO bertujuan untuk menjaga kebebasan dan keamanan anggotanya melalui kerjasama politik dan militer, serta prinsip pertahanan kolektif. Ini berarti bahwa jika salah satu anggota NATO diserang, anggota lainnya akan memberikan bantuan dan perlindungan. Aliansi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik, militer, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks politik, aliansi dapat terbentuk antara negara-negara dengan tujuan politik tertentu. Contoh aliansi politik yang terkenal antara lain NATO (Organisasi Pertahanan Negara-Negara Atlantik Utara) dan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Dalam konteks militer, aliansi dapat terbentuk untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan bersama. Contoh aliansi militer yang terkenal adalah NATO dan ANZUS (Perjanjian Pertahanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat). Aliansi juga dapat terbentuk dalam konteks ekonomi, seperti aliansi bisnis antara perusahaan-perusahaan untuk mencapai keuntungan bersama.

Selain itu, aliansi politik juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan politik bagi negara-negara anggota. Misalnya, aliansi dapat memberikan akses ke pasar yang lebih luas, memperkuat posisi negara-negara anggota dalam perundingan internasional, atau meningkatkan kekuatan politik mereka secara bersama-sama. Dalam konteks aliansi politik, penting untuk diingat bahwa aliansi dapat berubah seiring dengan perubahan situasi politik dan kepentingan nasional. Aliansi politik dapat

terbentuk dan bubar seiring dengan perubahan dinamika politik global dan regional.²²

Dalam konteks hubungan internasional, aliansi sering kali menjadi faktor penting dalam membentuk dinamika kekuasaan global dan regional, serta dalam membentuk kebijakan luar negeri dan keamanan negara-negara yang terlibat.²³ Pembangunan aliansi merupakan proses pembentukan, pengembangan, dan pemeliharaan aliansi tersebut. Hal ini melibatkan negosiasi, diplomasi, dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pembangunan aliansi dapat memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan kekuatan kolektif, pertukaran sumber daya dan pengetahuan, serta peningkatan akses ke pasar atau wilayah baru. Namun, pembangunan aliansi juga dapat melibatkan tantangan, seperti kesulitan dalam mencapai konsensus, konflik kepentingan, atau ketidaksetiaan anggota aliansi.²⁴ Oleh karena itu, manajemen yang efektif dan komunikasi yang baik antara anggota aliansi sangat penting untuk kesuksesan aliansi tersebut. Dalam aliansi, masing-masing pihak memiliki kontribusi dan peran yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun tujuan aliansi yang umumnya diinginkan antara lain efektivitas

²² *Ibid*

²³ Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁴ Sarjito, I. A., Duarte, E. P. (2023). *Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global*. Bandung, Indonesia Emas Group.

dan efisiensi dalam mencapai tujuan, meningkatkan mutu hasil kerja, serta memperluas jangkauan dan pengaruh organisasi atau kelompok. Aliansi dapat memberikan banyak manfaat baik secara finansial maupun non-finansial. Diantaranya adalah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, menambah sumber daya manusia, teknologi, atau modal untuk mencapai tujuan bersama, memperluas jangkauan dan memperkuat pengaruh organisasi atau kelompok, menambah wawasan dan pengalaman dalam industri atau bidang yang sama.²⁵

2.2 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan karya ini, penulis mengumpulna data dan informasi melalui beberapa jurnal dan artikel terkait, dan menyimpulkan isi dari jurnal tersebut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Suci Ayu Rohdianti (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Proliferasi Nuklir di Iran pada era Donald Trump periode 2018-2019”. Di dalam jurnal ini membahas dan menganalisa implementasi kebijakan Amerika Serikat terhadap nuklir iran pada era Donald Trump melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan yaitu seperti mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA, sanksi ekonomi serta tekanan politik, dan kebijakan *Significant Exception Reduction*. Di era Donald Trump pemerintahan Amerika Serikat memang lebih memfokuskan pada kebijakan luar negeri yang agak ketat dibandingkan dengan sebelumnya Dimana hal tersebut demi kepentingan yang dimilikinya.

²⁵ Sudarsono, H. (2020). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta, Pustaka Abadi.

Jurnal ini dijadikan sebagai telaah Pustaka dikarenakan memiliki kesamaan yang sama-sama membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Amerika Serikat terhadap nuklir Iran pada era Donald Trump melalui beberapa kebijakan.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Erlinda Matondang (2023) yang berjudul “Proyeksi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Era Pemerintahan Biden Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Indonesia.” Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan Amerika Serikat setelah terpilihnya Joe Biden sebagai presiden ke-46 AS membawa babak baru dalam hubungan internasional. Pemerintahan Joe Biden merilis sejumlah kebijakan baru walaupun untuk penerapannya mungkin akan berjalan secara efektif di tahun 2022 atau disaat masa perpindahan pemerintah sudah berakhir. Dalam kebijakan luar negeri AS, tak satupun wilayah menjadi fokus utama dan pemerintahan Biden cenderung menunjukkan fokusnya pada perbaikan kondisi domestik dan pemulihan kerja sama dengan beberapa entitas internasional.

Jurnal ini dijadikan sebagai telaah Pustaka karena memiliki kesamaan yang sama-sama membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat era Joe Biden dan implikasinya. Jurnal ini secara komprehensif menganalisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden. Mulai dari prioritas kebijakan hingga strategi diplomasi yang diimplementasikan, jurnal ini menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek

yang memengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan Negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Ketiga, jurnal artikel yang ditulis Fuad Rizki Satriyo, Ika Riswanti Putranti, Muhammad Faizal Alfian, 2023) dengan judul “Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam *Paris Agreement* Pada Masa Pemerintahan Joe Biden.” jurnal ini menulis tentang adanya perbedaan fokus kebijakan antara trump yang antroposentris dan Biden yang ekosentris mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam *paris agreement*. Jurnal tersebut memberikan wawasan baru karena membahas perbedaan sikap antara Donald Trum dan Joe Biden sehingga peneliti dapat mengembangkan sumber daya baru. Peneliti mendapat banyak informasi sebagai penunjang untuk penyusunan dan Pustaka.

Dengan demikian, perbedaan antara jurnal dan judul skripsi adalah topik yang dibahas. Judul skripsi lebih umum dan mencakup implikasi perubahan kepemimpinan AS terhadap hubungan transatlantik secara keseluruhan. Hal ini mencakup perubahan kepemimpinan AS, perubahan dalam kerjasama dan hubungan dengan Negara-negara di kawasan transatlantik seperti Eropa, serta dampaknya pada dinamika politik dan ekonomi di kawasan tersebut.

BAB III

HUBUNGAN TRANSATLANTIK, AMERIKA SERIKAT & NATO

3.1. Gambaran Umum Hubungan Transatlantik

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Transatlantik telah mengalami tantangan karena krisis ekonomi di Eropa, penurunan anggaran pertahanan di Eropa, perbedaan pendapat mengenai keamanan dan respons terhadap risiko keamanan, perang melawan terorisme, serta keruntuhan rezim otoriter di Timur Tengah. Meskipun demikian, hubungan antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat memiliki peran penting dalam membentuk tatanan global setelah tahun 1945. Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa, yang merupakan pilar "Barat", menjadi kekuatan utama dalam tatanan keuangan internasional, sistem perdagangan bebas, dan keamanan kolektif.²⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa, GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan), serta sistem Bretton Woods yang meliputi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, semuanya berasal dari tradisi 'Barat', yang telah memungkinkannya mendapatkan posisi kepemimpinan yang sulit ditandingi oleh blok Komunis yang dipimpin oleh Soviet. Dalam kerangka tata kelola global ini, potensi dampak dari proses integrasi Eropa terhadap hubungan transatlantik menjadi suatu hal

²⁶ Fiadi, I. R. *Dari Netral Menuju Aliansi: Studi Kasus Pengajuan Keanggotaan Swedia Kepada North Atlantic Treaty Organization (NATO) Pada Tahun 2022* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

yang perlu dianalisis. Dalam konteks ini, kontribusi UE terhadap perubahan sistem internasional yang berbasis pada pola multipolar menjadi sangat penting dalam hubungan Transatlantik. Oleh karena itu, artikel ini menekankan kemampuan UE dalam memperkuat multilateralisme dalam perdagangan internasional dan peranannya dalam keamanan internasional sebagai bidang kebijakan di mana integrasi Eropa bisa berpengaruh terhadap hubungan Transatlantik. Keberhasilan Uni Eropa sebagai mitra setara bagi AS tergantung pada kemampuannya untuk menyampaikan pandangan yang seragam sebagai UE.²⁷

José Manuel Barroso, mantan Presiden Komisi Eropa, mengungkapkan pandangan ini dengan mengatakan: “Eropa memerlukan AS dan sebaliknya. Ketika kita bersuara seragam, tantangan apa pun dapat diatasi. Kita menjadi kemitraan yang sangat penting saat itu”. Dalam sektor ekonomi, pengenalan euro, peran tunggal UE dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kehadiran Eropa yang kuat dalam G8 dan G20 (di mana UE juga hadir secara independen), serta negosiasi TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership) antara UE dan AS menunjukkan bagaimana UE telah memainkan peran kepemimpinannya dalam memperkuat multilateralisme dan hubungannya dengan AS. Dalam aspek keamanan, pengembangan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama, Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa, serta kebijakan pembangunan dan kerja sama luar negeri UE, bersama dengan isu-isu

²⁷ Bhagwati, J. (2014). *Membela Globalisasi: Melawan Okol Dengan Akal* (Vol. 4). Institute for Migrant Rights Press.

seperti manajemen krisis di Balkan, Perang Irak, Krisis Libya, hubungan dengan Rusia, dan program nuklir Iran, merupakan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota UE dalam menyeimbangkan keinginan untuk mempertahankan kesatuan dan prioritas, tanpa mengasingkan AS. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kepemimpinan UE dan kontribusi yang belum signifikan terhadap perubahan global secara keseluruhan.

Pasca peristiwa 9/11, kontraterorisme menjadi fokus utama dalam keamanan dalam negeri, dan ini memicu penilaian ulang hubungan antara UE dan AS di negara-negara anggota UE. Meskipun ada isu-isu lain seperti perlindungan lingkungan dan Pengadilan Kriminal Internasional di mana UE berperan aktif dan memberikan kontribusi terhadap perubahan global, artikel ini akan memfokuskan pada dua area utama. Pertama, kebijakan perdagangan di mana integrasi Eropa telah memungkinkan UE untuk memainkan peran kepemimpinan dalam mempromosikan multilateralisme dan mendukung penciptaan dunia multipolar. Kedua, kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan UE di mana kemajuan integrasi Eropa masih terbatas, membatasi kemampuan UE dalam peran kepemimpinannya baik di tingkat internasional maupun dalam hubungannya dengan AS.²⁸

²⁸ Indonesia, D., Zulkarnaen, I., Chaidar, A., Sahrasad, H., & Januar, E. Program Ratifikasi Konvensi PBB tentang Daftar Hitam Organisasi Teroris.

Dalam konteks ini, perlu diakui bahwa hubungan transatlantik dan proses integrasi Eropa sedang dipengaruhi oleh dinamika keseimbangan kekuatan global. Meskipun UE dan AS dapat dianggap sebagai pemimpin relatif, kemampuan negara-negara berkembang untuk menantang tatanan liberal yang telah lama didominasi oleh Barat tetap menjadi isu yang belum terpecahkan. Negara-negara besar seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Rusia yang semakin bangkit kembali, menentang aturan yang telah dibuat oleh mitra transatlantik dan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menentukan arah pemerintahan global. Krisis ekonomi dan penurunan kredibilitas model ekonomi Barat semakin memperkompleks situasi ini. Dalam lanskap internasional yang terus berubah ini, kemampuan kepemimpinan UE untuk memperkuat multilateralisme atau berkontribusi pada dunia multipolar mungkin masih memiliki batasan yang signifikan.²⁹

Untuk mengkaji potensi hubungan transatlantik di masa depan, artikel ini pertama-tama akan membahas struktur kemitraan antara UE dan AS, kemudian mengeksplorasi dampak kebijakan perdagangan UE terhadap hubungan transatlantik, tata kelola multilateral, serta peran UE sebagai aktor dalam kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan internasional. Artikel ini akan membandingkan perkembangan kebijakan luar negeri, keamanan, dan pertahanan UE dengan kebijakan perdagangannya untuk memahami pengaruhnya terhadap hubungan

²⁹ Djatmiko, A. (2023). *Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional: Implementasi Teori Sekuritisasi dalam Kasus Narkoba Global*. Penerbit Andi.

transatlantik dan kontribusi UE dalam tata kelola multilateral di berbagai sektor. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan UE dalam memperkuat multilateralisme, perannya sebagai aktor kebijakan luar negeri dalam mempromosikan dunia multipolar, serta upayanya dalam menjalin hubungan yang lebih kokoh dengan AS.

3.1.1. Pelembagaan Hubungan Transatlantik

Proses integrasi yang semakin dalam seiring waktu telah mempengaruhi peran UE dalam mempromosikan dunia multipolar dan hubungannya dengan Amerika Serikat. Meskipun tahap awal integrasi menghadapi tantangan, MEE mulai mencerminkan aspirasi politik pasca-nasional. Amerika Serikat, yang memberikan pengakuan diplomatik kepada ECSC pada tahun 1953, terus mendukung proses integrasi sebagai alat yang efektif untuk menjamin stabilitas politik dan memajukan kesejahteraan di Eropa Barat.³⁰ Sejak tahun 1990-an, AS dan UE telah membentuk kerangka dialog dan kerja sama sebagai respons terhadap perkembangan integrasi Eropa dan dinamika hubungan UE-AS.

Peran UE dalam memperkuat multilateralisme melalui hubungan dengan AS telah dijelaskan oleh mantan Komisaris Hubungan Eksternal, Benita Ferrero-Waldner, pada tahun 2005 sebagai berikut: “Di tengah ancaman dan tantangan global, dengan pasar dan media global, keamanan

³⁰ Anshary, S. N. (2021). *Respon Uni Eropa Terhadap Belt And Road Initiative (Bri) Summit 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

dan kesejahteraan kita semakin bergantung pada sistem multilateral yang efektif.” Reformasi kelembagaan pertama-tama meningkatkan kapasitas UE untuk menjadi mitra setara dengan AS dalam berbagai isu seperti perdagangan, lingkungan, dan persaingan. Ini menunjukkan kontribusi UE dalam memperkuat multilateralisme dalam konteks isu-isu global. “Eropa yang bersatu memiliki kesempatan untuk menjadi kekuatan pendorong dalam manajemen globalisasi yang efektif. Dengan ukuran sebagai indikator kekuatan pasar, MEA menjadi salah satu pemain kunci dalam perdagangan internasional. Proses integrasi memfasilitasi penggunaan alat diplomasi bilateral, seperti diplomasi melalui pertemuan puncak. Langkah awal ini diambil pada tahun 1990 dengan Deklarasi Transatlantik dan pertemuan puncak tahunan antara EC/EU dan AS, menandai pengakuan AS terhadap EC sebagai mitra setara. Selain itu, Deklarasi Transatlantik meningkatkan peran Komisi Eropa dalam hubungan transatlantik, memfasilitasi koordinasi antara perwakilan UE dan AS dalam pertemuan rutin di berbagai bidang. Oleh karena itu, deklarasi ini menciptakan Dialog Transatlantik sebagai mekanisme kunci dalam negosiasi antara UE dan AS.

Pada tahun 1995, langkah tambahan diambil dengan pengenalan Agenda Transatlantik Baru (NTA), yang mengikat kedua pihak untuk meningkatkan pertukaran antarmasyarakat, memperdalam hubungan ekonomi, dan meningkatkan kerja sama politik. NTA membentuk kerangka kerja baru untuk pertemuan tingkat tinggi dan menjelaskan

mekanisme kerja sama serta konsultasi untuk kelompok kerja teknis. NTA mencerminkan hasil dari proses integrasi Eropa di satu sisi dan upaya UE untuk memperkuat multilateralisme dalam politik internasional di sisi lain. Deklarasi dan NTA dapat dianggap sebagai respons AS dan UE terhadap ketidakpastian pasca-Perang Dingin, yang memperkuat hubungan mereka di luar NATO melalui kerja sama di bidang lain. Pada tahun 1998, perkembangan selanjutnya dari pelembagaan hubungan transatlantik terjadi dengan adopsi Kemitraan Ekonomi Transatlantik (TEP) pada KTT UE-AS di London, yang menetapkan rencana untuk kerja sama lebih lanjut dan koordinasi posisi di organisasi internasional.

Penerapan NTA dan TEP menunjukkan bahwa integrasi Eropa telah mencapai tahap di mana Komisi Eropa menjadi mitra utama AS, terutama dalam konteks perdagangan. Pada tahun 1999, kerangka konsultasi baru diperkenalkan melalui Dialog Legislator Transatlantik, yang melibatkan konsultasi antara anggota Parlemen Eropa dan Kongres AS. Dewan Ekonomi Transatlantik dibentuk pada tahun 2007 untuk mengkoordinasikan kerja sama ekonomi antara kedua sisi Atlantik. Pollack dan Shaffer (2010) menekankan meningkatnya peran lembaga-lembaga Uni Eropa dalam hubungan Transatlantik dan kemampuan UE dalam memperkuat multilateralisme melalui peran yang dimainkan oleh Komisi Eropa. Dengan demikian, pelembagaan hubungan UE-AS selama tahun 1990-an dapat dilihat sebagai ekspansi peran UE dalam membangun

dunia multipolar, dengan aktivitas multilateral UE sebagai kelanjutan logis dari integrasi UE melalui kedaulatan gabungan.³¹

Sejak tahun 2012, ada momentum baru dalam kebijakan Transatlantik dengan dimulainya dialog kemitraan perdagangan, TTIP (Trade and Investment Partnership). TTIP bertujuan untuk memperdalam hubungan perdagangan Transatlantik dan menciptakan Kawasan Perdagangan Bebas terbesar di dunia dengan menghilangkan hambatan tarif dan mengurangi hambatan non-tarif. TTIP tidak hanya akan mengubah dinamika perdagangan Transatlantik tetapi juga akan berdampak pada perdagangan global dan pendapatan negara-negara di seluruh dunia. Sebagai perkembangan global, UE, melalui Komisi Eropa, berpartisipasi sebagai mitra setara dengan Amerika dalam TTIP.

Meskipun hubungan Transatlantik terus berkembang, kompleksitas internal dalam proses integrasi Eropa mempengaruhi kemampuan UE untuk memainkan peran kepemimpinan di panggung internasional. Ini terillustrasi pada tahun 2010 ketika Presiden AS, Barack Obama, menolak undangan untuk pertemuan puncak yang diadakan oleh kepresidenan UE Spanyol, dengan alasan formal bahwa kepresidenan tersebut tidak lagi mewakili UE menurut Perjanjian Lisbon. Sebagai gantinya, Presiden AS menghadiri KTT UE-AS pada November 2010, yang diselenggarakan oleh Presiden Dewan Eropa saat itu, Herman Van Rompuy. Kejadian ini

³¹ *Ibid*

mencerminkan dinamika internal dan kompleksitas kelembagaan UE dalam hubungan Transatlantik.

Reformasi kelembagaan yang telah dilakukan bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ada. Contohnya, perubahan yang diakibatkan oleh Perjanjian Lisbon memungkinkan HR dan EEAS (European External Action Service) untuk bernegosiasi atas nama semua negara anggota UE dalam konferensi internasional besar. Di bidang tertentu seperti perubahan iklim, Komisi Eropa menjadi negosiator utama. Dampaknya terhadap hubungan transatlantik mirip dengan dampak yang terjadi di Asia Tenggara, di mana KTT EEC/EU-AS dapat terlaksana karena SEA menciptakan kesatuan pendapat bagi anggota UE dalam hal perdagangan. Ini mencerminkan kemampuan kepemimpinan UE dalam memperkuat multilateralisme.

Hubungan ekonomi transatlantik merupakan yang paling kuat di dunia, baik dari segi struktur kelembagaannya maupun volume perdagangannya. Jalur integrasi Eropa, yang didorong oleh integrasi ekonomi, telah mempengaruhi hubungan ekonomi transatlantik. Eropa yang kuat dan bersatu tentunya akan memperkuat hubungan ekonomi transatlantik dengan memberikan pasar yang besar dan terbuka bagi perusahaan dan investor Amerika. Selain itu, tujuan utama integrasi Eropa adalah untuk mencegah perang di benua Eropa, sehingga proses integrasi ini juga mempengaruhi aspek keamanan hubungan transatlantik. Krisis ekonomi Eropa sejak 2008 memiliki dampak signifikan pada kedua belah

pihak dalam hubungan ini. Krisis ekonomi di UE, yang melibatkan masalah utang dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, juga penting bagi AS. Peran UE dalam mempromosikan dunia yang multilateral dan multipolar menjadi lebih jelas dan relevan dalam konteks ekonomi transatlantik dibandingkan dengan aspek keamanan dan pertahanan.

3.1.2. Integrasi Eropa dan Hubungan Ekonomi Transatlantik

Selama beberapa dekade, dan bahkan berabad-abad, Barat telah menjadi kekuatan ekonomi dominan di dunia. Saat ini, gabungan ekonomi antara AS dan UE mencapai sekitar 45 persen dari total PDB global (Bank Dunia, 2014), menjadikan keduanya sebagai mitra dagang dan investasi kunci satu sama lain.³²Kita dapat menyimpulkan bahwa hampir 97 persen hubungan ekonomi antara UE dan AS berjalan tanpa konflik. Oleh karena itu, kedua pihak ini memiliki peran penting dalam membentuk dinamika ekonomi global dan struktur pemerintahan. Klaim oleh Jacoby dan Meunier (2010) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi UE memungkinkannya untuk 'mengelola globalisasi' dengan memperkuat lembaga-lembaga internasional. AS dan UE, jika bertindak secara bersama-sama, tetap menjadi kekuatan dominan di lembaga-lembaga ekonomi global utama seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.³³Secara spesifik, perdagangan telah menjadi area di mana dampak integrasi Eropa paling terlihat dalam hubungan transatlantik. Kebijakan perdagangan UE

³² Dent, C. M. (2019). Perkembangan Utama Dan Arah Masa Depan Perdagangan Asia. *Handbook Hubungan Internasional Asia*, 341.

³³ Djelantik, S. (Ed.). (2015). *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

menetapkan standar yang konsisten, termasuk tarif bea cukai yang seragam, rezim impor dan ekspor yang sejalan, serta langkah-langkah liberalisasi dan perlindungan perdagangan yang harmonis. Kebijakan perdagangan UE mendorong negara-negara anggotanya untuk berkoordinasi dalam kebijakan perdagangan eksternal mereka untuk mencapai tujuan pasar internal UE. Dengan demikian, kebijakan perdagangan UE telah berkembang di tingkat supra-nasional dan bukan hanya antarpemerintah.

Salah satu prestasi luar biasa dari integrasi Eropa di sektor ekonomi adalah pendirian Pasar Tunggal melalui Undang-Undang Tunggal Eropa tahun 1986 dan pengenalan mata uang tunggal, euro, pada 1999. Ini mencerminkan dampak terbesar dari integrasi ekonomi Eropa terhadap tata kelola global dan hubungan transatlantik. Undang-Undang Tunggal Eropa 1986 dianggap sebagai titik balik dalam sejarah integrasi ekonomi Eropa. Di era 1980an, ketika negara-negara anggota EEC menghadapi penurunan, SEA berhasil memperkuat ekonomi mereka dan memungkinkan EEC, yang berasal dari Komunitas Eropa (EC), untuk menjadi kekuatan dominan dalam negosiasi perdagangan di WTO.

Secara khusus, Komisi Eropa berkolaborasi dengan Amerika Serikat dalam Putaran Uruguay dan berperan dalam pendirian WTO pada 1995. Saat UE memperluas wewenang legislatifnya dalam perdagangan dan pasar internal, tanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga dan mewakili diri di forum internasional beralih dari negara anggota ke

UE sebagai keseluruhan.³⁴ Hal ini menyebabkan proses negosiasi internal yang kompleks di antara negara anggota sebelum mereka berpartisipasi dalam perundingan internasional. Proses ini dipimpin oleh Dewan melalui Komite Pasal 133 yang khusus mengurus masalah perdagangan. Integrasi perdagangan Eropa semakin diperkuat dengan Perjanjian Lisabon, yang memberikan lebih banyak wewenang kepada Parlemen Eropa dalam hal perdagangan. Perjanjian perdagangan yang diadopsi oleh Dewan Eropa dan diperundingkan oleh Komisi Eropa (yang berwenang mengusulkan dan merancang undang-undang UE) kini membutuhkan persetujuan dari Dewan dan Parlemen Eropa sebelum diberlakukan. Sebagai hasilnya, Parlemen Eropa menjadi kekuatan penting dalam masalah perdagangan, memperkuat kapasitas UE untuk berinteraksi dengan AS di sektor ekonomi.³⁵

3.2. Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization*

Amerika Serikat, bersama dengan Kanada dan 10 negara Eropa, memainkan peran utama dalam pembentukan NATO pada tahun 1949. Tujuan awalnya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan militer Uni Soviet yang menjarah daerah Eropa Timur. Pada tahun 1949, di tengah ketegangan geopolitik pasca Perang Dunia II antara Blok Barat dan Blok Timur, Amerika Serikat (AS), bersama dengan Kanada dan 10 negara Eropa, memegang peran yang sangat

³⁴ Massaguni, M., Badu, M. N., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 43-67.

³⁵ Malaysia, P. A. I. D. (2019). Laporan Akhir Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi.

penting dalam pendirian Aliansi Atlantik Utara (NATO).³⁶ Respons terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat akan ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur, pembentukan NATO dianggap sebagai langkah strategis yang vital untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. Sebelum pembentukan NATO, kekhawatiran akan agresi militer dari Uni Soviet telah menjadi perhatian utama di kalangan negara-negara Eropa Barat. Setelah Perang Dunia II, ketegangan politik dan ketidakpastian tentang niat Uni Soviet memicu rasa solidaritas di antara beberapa negara Eropa Barat, terutama di bawah pengaruh Amerika Serikat. Upaya untuk membentuk aliansi pertahanan yang lebih formal pun mulai digagas.

Pada tahun 1948, negara-negara Barat mendirikan Perjanjian Brussel, sebuah pakta pertahanan yang menandai awal dari apa yang kemudian akan menjadi NATO. Namun, perjanjian ini hanya melibatkan negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luksemburg) serta Prancis dan Inggris.



Gambar 3.1 Perjanjian Brussel 1948 Sumber : *idsejarah*

³⁶ Purmintasari, Y. D. NATO: Kajian Implementasi Containment Policy Bidang Militer di Eropa (1949-1991). *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2). 2013
<http://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5352>

³⁷Kesadaran akan kebutuhan akan perlindungan yang lebih kuat melawan ancaman militer yang semakin nyata dari Uni Soviet mulai tumbuh. Inisiatif pembentukan NATO menjadi semakin penting ketika Uni Soviet melakukan blokade terhadap Berlin pada tahun 1948. Tindakan agresif ini memicu kekhawatiran akan kemungkinan ekspansi lebih lanjut dari Uni Soviet di Eropa. Hal ini membuat para pemimpin Barat menyadari pentingnya kemitraan yang kokoh dan terstruktur dalam menghadapi ancaman semacam itu.

Pada tanggal 4 April 1949, perjanjian yang menciptakan NATO ditandatangani di Washington, D.C. oleh 12 negara: Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Britania Raya



Gambar 3.2 Pertemuan 12 negara 1949 Sumber : *North Atlantic Treaty Organization*

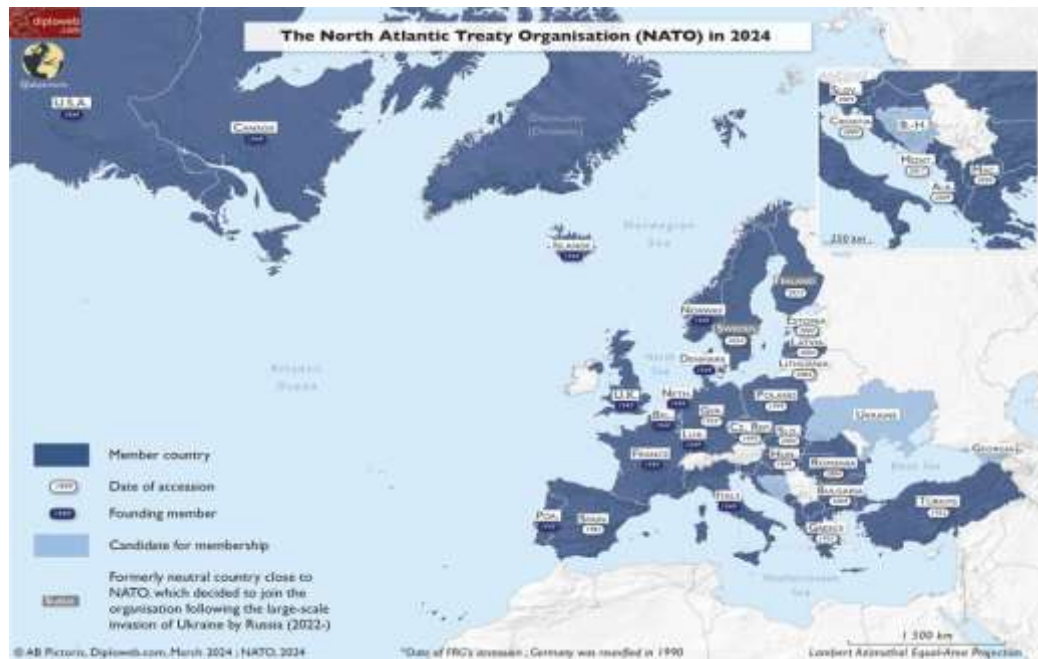
³⁷ Putri, S. Y., & Gultom, Y. S. M. Kemunduran Western European Union dalam Arsitektur Keamanan Eropa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 617-623.2023 <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4240>

NATO didirikan sebagai aliansi pertahanan yang bertujuan melindungi negara-negara anggotanya dari ancaman militer eksternal, terutama dari Uni Soviet. Salah satu tujuan utama NATO pada awalnya adalah memberikan perlindungan kolektif terhadap serangan militer terhadap negara-negara anggotanya. Pasal 5 Perjanjian NATO, yang dikenal sebagai prinsip pertahanan kolektif, menyatakan bahwa serangan terhadap satu atau beberapa anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, dan negara-negara anggota akan merespons dengan tindakan bersama sesuai kebijakan masing-masing.³⁸

NATO memiliki 32 negara anggota³⁹. Negara-negara ini, yang disebut Sekutu NATO, adalah negara-negara berdaulat yang bersatu melalui NATO untuk membahas masalah politik dan keamanan dan membuat keputusan kolektif berdasarkan konsensus. NATO juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama militer antara negara-negara anggotanya guna meningkatkan efektivitas pertahanan mereka secara kolektif. Ini termasuk pembentukan struktur komando militer terpadu dan kerjasama dalam latihan militer bersama serta pengembangan teknologi militer. Selama tahun-tahun awal berdirinya, NATO berkembang menjadi organisasi yang lebih kompleks dengan berbagai mekanisme dan struktur, termasuk Komite Militer, Dewan Atlantik Utara, dan Sekretaris Jenderal NATO.

³⁸ Dianya Sarah Adriaansz, D. S. A. Perluasan Makna Pasal 5 North Atlantic Treaty 1949 oleh North Atlantic Treaty Organization Ditinjau dari Outer Space Treaty 1967. (2022) <http://repository.ubaya.ac.id/42484/>

³⁹ BBC NEWS, "What is Nato, which countries are members and how much do they spend on defence" 23 April 2024. <https://www.bbc.com/news/world-europe-18023383>



Gambar 3.3 Peta North Atlantic Treaty Organization in 2024 Sumber :

Diploweb.com

⁴⁰Organisasi tersebut tidak hanya menginisiasi program-program kolaborasi ekonomi dan politik di antara anggotanya, tetapi juga menggalakkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman guna memperkuat solidaritas antara negara-negara pesertanya. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga diplomasi, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan keamanan bersama. Melalui langkah-langkah ini, organisasi berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas politik di seluruh wilayah anggotanya.

⁴⁰ *Ibid*

Peran AS dalam NATO sangat penting sejak awal. AS bukan hanya negara pendiri, tetapi juga menyediakan sebagian besar sumber daya militer dan finansial untuk aliansi. Keterlibatan AS dalam NATO mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Eropa dan menghadapi ancaman komunis. Keberadaan AS dalam NATO juga memberikan legitimasi politik dan militer yang kuat bagi aliansi tersebut. Sebagai kekuatan militer terkuat di dunia saat itu, AS memberikan keyakinan kepada negara-negara anggota NATO bahwa mereka memiliki perlindungan yang kuat terhadap ancaman eksternal.

Selama Perang Dingin, NATO menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keamanan global. Aliansi ini memainkan peran kunci dalam menyeimbangkan kekuatan antara Blok Barat dan Blok Timur, serta dalam mencegah terjadinya konflik militer langsung antara kedua blok tersebut. Melalui keberadaannya, NATO berhasil menjaga stabilitas di Eropa dan mencegah ekspansi agresif dari Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, NATO menghadapi tantangan baru dalam menentukan perannya di era pasca-Perang Dingin. Namun, aliansi ini tetap relevan sebagai instrumen untuk menghadapi ancaman keamanan baru, termasuk terorisme internasional, konflik regional, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Dalam dua dekade terakhir, NATO telah berkembang menjadi organisasi keamanan kolektif yang lebih luas, dengan fokus tidak hanya pada pertahanan militer, tetapi juga pada pemeliharaan perdamaian, penanganan krisis, dan pembangunan kapasitas. Aliansi ini telah memperluas cakupannya untuk mencakup negara-negara di luar

Eropa, termasuk melalui kemitraan dengan negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika.

Di tengah perubahan dinamika geopolitik, peran dan relevansi NATO tetap menjadi topik perdebatan dan diskusi. Namun, satu hal yang tetap jelas adalah bahwa aliansi ini tetap menjadi pilar utama dalam arsitektur keamanan global, memberikan perlindungan dan keamanan bagi negara-negara anggotanya serta berkontribusi pada stabilitas regional dan internasional secara keseluruhan.. AS terlibat dalam beberapa konflik yang terkait dengan NATO, termasuk Perang Dunia II dan beberapa konflik regional di Eropa dan Asia. AS juga telah memberikan dukungan militer dan politik kepada beberapa negara anggota NATO, seperti Ukraina, dalam konflik dengan Rusia. Ada beberapa insiden dimana AS telah dikaitkan dengan kemungkinan keluarnya dari NATO. Misalnya, pada tahun 2019, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa AS tidak akan melindungi sekutu-sekutunya di NATO jika mereka tidak memenuhi kewajiban menanggung belanja pertahanan. Trump juga mengancam menarik AS keluar dari NATO jika sekutu-sekutunya di Eropa tidak menanggung kewajiban finansial yang lebih besar untuk jaminan keamanan mereka sendiri.

Pada 2014, NATO aktif dalam lima tugas: operasi pemeliharaan perdamaian di Kosovo; patroli anti-terorisme di Mediterania; anti-pembajakan di Teluk Aden dan Tanduk Afrika; dukungan kepada Uni Afrika di Somalia; serta fokus utama aliansi, *International Security Assistance*

Force (ISAF) di Afghanistan. Dengan markas di Brussels, Belgia, ⁴¹NATO adalah aliansi berdasarkan kesepakatan bersama, di mana keputusan diambil berdasarkan kehendak bersama anggota. Namun, negara-negara anggota atau kelompok aliansi tertentu dapat memulai tindakan di luar kerangka NATO. Sebagai contoh, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris mulai mengawasi zona larangan terbang di Libya yang disetujui PBB pada 2011, dan dalam beberapa hari kemudian, komando operasi dialihkan ke NATO setelah mengatasi kekhawatiran Turki. Meskipun demikian, tidak semua anggota aliansi wajib berpartisipasi dalam setiap operasi. Seperti yang terjadi ketika Jerman dan Polandia memilih untuk tidak berkontribusi langsung dalam kampanye di Libya.

Struktur militer NATO memiliki dua komando strategis utama: Markas Besar Tertinggi Sekutu Kekuatan Eropa yang berlokasi dekat Mons, Belgia, dan Transformasi Komando Sekutu yang berbasis di Norfolk, Virginia. ⁴²Panglima Tertinggi Sekutu Eropa, yang saat ini dijabat oleh Jenderal Philip M. Breedlove, memimpin semua kegiatan militer NATO dengan mengibarkan bendera AS atau melalui perwira umum. Meskipun ada komando terpusat, kebanyakan pasukan tetap beroperasi di bawah komando nasional mereka sampai dimulainya operasi NATO. Sekretaris Jenderal NATO, yang saat ini dijabat oleh Anders Fogh Rasmussen dari Denmark dan

⁴¹ NATO, "Operations and missions," NATO, diakses pada [1 Mei 2024]. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.476753019218171>

⁴² Perry, R. M., & Army Command And General Staff Coll Fort Leavenworth Ks School Of Advanced Military Studies. (2002). *Nato Transformation In An Era Of Enlargement* (Doctoral Dissertation, Master Thesis. Us Army Command And General Staff College, School Of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Ks).

akan digantikan oleh mantan perdana menteri Norwegia Jens Stoltenberg pada Oktober 2014, bertanggung jawab sebagai kepala administrator dan perwakilan internasional. Dewan Atlantik Utara adalah forum politik kunci dari aliansi ini, yang terdiri dari delegasi tingkat tinggi dari negara-negara anggota..

Anggaran NATO dibagi menjadi tiga bagian terpisah yang didedikasikan untuk operasi kolektif aliansi, termasuk pendanaan markas besar sipil, militer, dan infrastruktur keamanan khusus. Kontribusi keuangan negara-negara anggota disesuaikan dengan ukuran ekonomi relatif mereka. Pada tahun 2014, Amerika Serikat berkontribusi sekitar 22 persen ke tiga akun tersebut.⁴³ Meski demikian, kontribusi finansial utama dari negara-negara anggota berasal dari biaya yang mereka keluarkan untuk menempatkan pasukan bersenjata mereka dalam operasi yang dipimpin oleh NATO, yang tidak termasuk dalam anggaran NATO resmi. Pada tahun 2014, Pentagon menyumbang lebih dari 70 persen dari total belanja pertahanan NATO, meningkat dari sekitar setengahnya selama periode Perang Dingin. Pada tahun 2006, negara-negara anggota berjanji untuk mengalokasikan 2 persen dari PDB mereka untuk pertahanan, tetapi pada tahun 2012, hanya empat negara yang memenuhi target tersebut: Amerika Serikat, Inggris, Yunani, dan Estonia.

Dalam pidatonya terakhir sebagai Menteri Pertahanan AS pada Juni 2011, Robert Gates mengkritik kekurangan beberapa anggota NATO, menyatakan bahwa "banyak sekutu yang hanya duduk di sela-sela dan melakukan hal yang

⁴³ Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). BAB 2 Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID-19. *Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*.

sama, bukan karena mereka tidak mau berpartisipasi, melainkan karena mereka tidak memiliki kemampuan. Kemampuan militer mereka sangat terbatas." Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang "aliansi dua tingkat," di mana beberapa anggota fokus pada misi kemanusiaan yang "lunak," sementara yang lain fokus pada peran tempur yang "keras." Gates menegaskan bahwa ini bukan lagi kekhawatiran yang bersifat spekulatif. "Kami berada di situasi tersebut saat ini, dan ini tidak bisa dibiarkan terjadi."⁴⁴ Sekretaris Jenderal Rasmussen menyampaikan kekhawatiran serupa dalam laporan tahunannya tahun 2012, memperingatkan tentang ketergantungan militer yang meningkat terhadap Amerika Serikat dan ketidakseimbangan dalam kemampuan militer anggota Eropa. Ini dapat mengurangi solidaritas aliansi dan menghambat kemampuan anggota Eropa untuk bertindak secara mandiri tanpa melibatkan Amerika Serikat.⁴⁵

Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran udara NATO di Polandia dan negara-negara Baltik; negara-negara sekutu lainnya, termasuk Inggris, Jerman, dan Denmark, juga berinisiatif untuk memberikan bantuan. NATO sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pangkalan permanen di Baltik, suatu langkah yang sebelumnya dihindari karena khawatir dapat memicu reaksi Rusia.⁴⁶ Aliansi ini juga akan memperluas hubungannya dengan Ukraina, mitra aliansi sejak 1994, termasuk dalam mendukung reformasi pertahanan. Namun,

⁴⁴ Richter, A. (2016). Sharing the burden? US allies, defense spending, and the future of NATO. *Comparative Strategy*, 35(4), 298-314.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Fiadi, I. R. From Neutral to Alliance: Case Study of Sweden's Membership Application to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 2022 (Bachelor's thesis, International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta).

sebagai non-anggota, Ukraina tetap berada di luar cakupan pertahanan NATO, dengan batasan jelas tentang sejauh mana Ukraina dapat diintegrasikan ke dalam struktur aliansi. Saat krisis Ukraina berlanjut, diperkirakan perencanaan militer NATO akan mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat pertahanan kolektif aliansi. "Apa yang diperlukan oleh negara-negara NATO adalah keyakinan bahwa mereka aman dan bahwa anggota aliansi akan memberikan dukungan mereka. Itu adalah relevansi NATO," ujar Lee Feinstein, mantan duta besar AS untuk NATO Polandia, setelah Rusia mengambil alih Krimea. "Tidak ada keraguan bahwa Putin menganggap NATO dan komitmen Pasal V-nya dengan sangat serius." Meskipun NATO telah beradaptasi dengan ancaman global mulai dari pembajakan di Tanduk Afrika hingga pemberontak Taliban di Afghanistan, namun sebagian besar, NATO modern lebih dikenal karena operasinya di luar Eropa.

Tindakan Rusia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk konflik tahun 2008 dengan Georgia dan aneksasi Krimea tahun 2014, telah menggeser fokus aliansi kembali ke Eropa.⁴⁷ Perkembangan terbaru juga mengungkapkan ketegangan yang masih ada mengenai ekspansi NATO ke bekas wilayah Uni Soviet. Tindakan Rusia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Konflik tahun 2008 dengan Georgia dan aneksasi Krimea tahun 2014 menjadi sorotan utama yang mengubah dinamika keamanan di wilayah tersebut. Respons terhadap tindakan-tindakan ini telah mengarah pada pergeseran fokus aliansi kembali ke Eropa, dengan NATO dan Uni Eropa

⁴⁷ Al Abror, M. Y. *Konflik image Rusia dan Ukraina dalam eurovision song contest 2016-2017* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah). 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43093>

memperkuat koordinasi dan upaya pertahanan mereka.

Perkembangan terbaru menyoroti ketegangan yang masih ada sehubungan dengan ekspansi NATO ke bekas wilayah Uni Soviet. Langkah-langkah seperti peningkatan kehadiran militer di negara-negara Baltik dan perluasan infrastruktur pertahanan telah memicu reaksi dari pihak Rusia, yang menganggap langkah-langkah ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional mereka. Ketegangan antara Rusia dan NATO telah menciptakan ketidakpastian politik dan keamanan di Eropa Timur⁴⁸. Sementara upaya diplomasi terus dilakukan untuk meredakan ketegangan, sengketa teritorial dan perbedaan pandangan strategis antara Rusia dan negara-negara NATO tetap menjadi tantangan besar bagi stabilitas regional. Perkembangan di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang dapat diterima secara luas dan mempromosikan keamanan serta kerja sama di wilayah tersebut.

⁴⁸ Bustami, S. Y. Perubahan Kebijakan Pertahanan Turki Mendukung Keanggotaan Finlandia di North Atlantic Treaty Organization (NATO): Perspektif Reputasi. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 77-99. 2023. <http://ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/view/127>

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Amin, Khoirul (2023). *"Rivalitas dua raksasa asia: modernisasi militer Cina dan respons India."*, Yogyakarta, Grup Penerbit Cv Budi Utama.
- Ashari, K. (2020). *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Abdussamad, H. Z., & Sik M. S (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar CV. Syakir Media Press Case Hal. 29.
- Bhagwati, J. (2014). *Membela Globalisasi: Melawan Okol Dengan Akal* (Vol. 4). Institute for Migrant Rights Press.
- Djarmiko, A. (2023). *Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional: Implementasi Teori Sekuritisasi dalam Kasus Narkoba Global*. Penerbit Andi.
- Dent, C. M. (2019). Perkembangan Utama Dan Arah Masa Depan Perdagangan Asia. *Handbook Hubungan Internasional Asia*, 341.
- Djelantik, S. (Ed.). (2015). *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi dan Antarkawasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Daerah Khusus ibu kota Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Kota Jakarta Pusat.
- Kostić, M., & Stefanović, A. (2021). The Biden Administration and Arms Control. *Politika nacionalne bezbednosti*, 21, 45-73.
- Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (2010). *Politik antarbangsa*. Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahanani, E. (2022). Book Chapter" *Bisnis Internasional" Ch 7. Aliansi Strategis Internasional*, Bandung Penerbit: CV. Media Sains Indonesia.
- Machmudi, Y. (2021). *Timur Tengah dalam sorotan: dinamika Timur Tengah dalam perspektif Indonesia*. Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2022). *Foreign Policy*. Malang, Indonesia Elex Media Komputindo.

- Nainggolan, P. P. (2021). *Konflik Internal dan Kompleksitas Proxy War di Timur Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (AA Effendy). Surabaya, Cipta Media Nusantara. Hal 6.
- Rosyidin, M . (2020). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Bandung, PT Raja Grafindo Persada.
- Richter, A. (2016). Sharing the burden? US allies, defense spending, and the future of NATO. *Comparative Strategy*, 35(4), 298-314.
- Rorabaugh, W. J. (2009). *The real making of the president: Kennedy, Nixon, and the 1960 election*. University Press of Kansas.
- Sarjito, I. A., Duarte, E. (2023). *Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global*. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Indonesia Emas Group.
- Sudarsono, H. (2020). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta, Pustaka Abadi.
- Setiawan, A & Sulastri, E, (2017), *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta, UMJ Press
- Turmudi, E., & Sihbudi, M. R. (Eds.). (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Tamara, N. (2021). Chapter 13 Democracy Is Freedom And Justice. Democracy In The Digital Age, 13.
- Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). BAB 2 Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID-19. *Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*.
- Yadav, A. S. . *Indo-Pasifik: sebuah konstruksi geopolitik*. Elex Media Komputindo.

Sumber Jurnal :

- Bustami, S. Y. Perubahan Kebijakan Pertahanan Turki Mendukung Keanggotaan Finlandia di North Atlantic Treaty Organization (NATO): Perspektif Reputasi. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(1), 77-99. 2023.
<http://ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/view/127>

- Fuad Rizki Satriyo, Ika Riswanti Putranti, Muhammad, Faizal Alfian, 2023. "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Paris Agreement Pada Masa Pemerintahan Joe Biden." *Journal of International Relations* Volume 9: 1–19. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Fiati, R., & Zuliyati, Z. (2016). Strategi Pengembangan Jaringan Usaha UMKM Figura Kaligrafi Memasuki Pasar Ekspor. *Jurnal Dianmas*, 5(1). <http://jurnaldianmas.org/index.php/Dianmas/article/view/7>
- Hennida, C. Diplomasi Publik Dalam Politik Luar Negeri. *Journal Unair: Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 22(1), 17-23.2009 https://www.academia.edu/download/32806342/03_Hennida_Diplomasi_Publik.Pdf
- Hussain, N., & Rahman, Z. A. Peranan Britain dalam menubuhkan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO) pada 1949. *SEJARAH: Journal of the Department of History*, 26(1 (June)). 2023 <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4240>
- Indrawati Indrawati and Agung Yudhistira Nugroho, "Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy]," *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)* 10, no. 20 (March 11, 2019): 14, <https://doi.org/10.19166/verity.v10i20.1462>.
- Indonesia, D., Zulkarnaen, I., Chaidar, A., Sahrasad, H., & Januar, E. Program Ratifikasi Konvensi PBB tentang Daftar Hitam Organisasi Teroris. <https://repository.unimal.ac.id/6656/1/Program%20Ratifikasi%20Konvensi%20PBB%20tentang.pdf>
- Kusuma, A. S. "Global Health dan COVID-19: Tantangan dan Adaptasi dalam Konstelasi Hubungan Internasional". (2022). http://repository.unsoed.ac.id/20555/1/Prosiding_Global%20Health%20dan%20Covid-19_lengkap.pdf
- Massaguni, M., Badu, M. N., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1), 43-67. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/21011>
- Nur Rachmat Yuliantoro, Atin Prabandari, Dafri Agussalim. 2017. "Pemilihan Presiden Tahun 2016 Dan Politik Luar Negeri Amerika Serikat. "

- Novita Mujiyati, Kuswono Kuswono, and Sunarjo Sunarjo, "United States During The Cold War 1945-1990," *HISTORIA* 4, no. 1 (February 28, 2016): 39, <https://doi.org/10.24127/hj.v4i1.481>.
- Organization Nato, D I Bawah, and Kepemimpinan Presiden, "Masuknya Kembali Perancis Dalam North Atlantic Treaty Helmy Adi Sanjaya" 3, no. 1 (2015): 64-76.
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1961>
- Purwanti, R. (2014). Evolusi dan Perkembangan Generasi Ketiga dalam Analisis Politik Luar Negeri. *Jurnal hubungan internasional. Malang: Universitas Brawijaya*.
<https://www.academia.edu/download/35019487/jurnal.pdf>
- Perry, R. M., & Army Command And General Staff Coll Fort Leavenworth Ks School Of Advanced Military Studies. (2002). *Nato Transformation In An Era Of Enlargement* (Doctoral Dissertation, Master Thesis. Us Army Command And General Staff College, School Of Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Ks).
- Pfiffner, J. P. (2021). The Violent Transition of the Presidency, 2020-2021. Available at SSRN 3770839.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3770839
- Praiswater, S. M. (2021). *The Effects of Eliminating the Electoral College on Primary Voters and Political Polarization* (Doctoral dissertation, Pepperdine University).
<https://search.proquest.com/openview/46cc7527c27abd45b27dbbb429d4f5d7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Purmintasari, Y. D. NATO: Kajian Implementasi Containment Policy Bidang Militer di Eropa (1949-1991). *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2). 2013
<http://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/view/5352>
- Putri, S. Y., & Gultom, Y. S. M. Kemunduran Western European Union dalam Arsitektur Keamanan Eropa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 617-623.2023
<http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4240>
- Shapiro, J, Pardijs D "The transatlantic meaning of Donald Trump: a US-EU Power Audit" 21 september 2017.

https://ecfr.eu/publication/the_transatlantic_meaning_of_donald_trump_a_us_eu_power_audit7229/

- Puspita, N. Y. . Kapasitas hukum indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan pbb dalam penanganan masalah perubahan iklim global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 66-82.2020
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24760>
- Hurd, G. S., Kerans, C., Fullmer, S., & Janson, X. . Large-scale inflections in slope angle below the shelf break: A first order control on the stratigraphic architecture of carbonate slopes: Cutoff Formation, Guadalupe Mountains National Park, West Texas, USA. *Journal of Sedimentary Research*, 86(4), 336-362.2016
<https://pubs.geoscienceworld.org/sepm/jsedres/article-abstract/86/4/336/145521>
- Rendy Sueztra Canaldhy, Suandi Suandi, and Umi Purwanti, “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (July 31, 2023): 47–63, <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i1.3494>.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 241–256. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.141> (Original work published April 29, 2023)
- Sadewa, D. P., Heryadi, D., & Hidayat, T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 89–103.
- Studi et al., *Serikat Terhadap Proliferasi Nuklir Di Iran Pada Era Donald Trump Periode 2018-2019*.
- Sudjatmiko, T., Yayusman, M. S., Budianto, F., & Syafarani, T. R. (2022). Peran Indonesia Sebagai Kekuatan Menengah Dalam G20 Di Tengah Disrupsi Geopolitik Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), 93-110.

Sumber Skripsi :

- Anshary, S. N. (2021). *Respon Uni Eropa Terhadap Belt And Road Initiative (Bri) Summit 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Fiadi, I. R. *Dari Netral Menuju Aliansi: Studi Kasus Pengajuan Keanggotaan Swedia Kepada North Atlantic Treaty Organization (NATO) Pada Tahun 2022* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kartikasari, F. (2021). Dampak Peningkatan Produksi Energi Terbarukan Uni Eropa Terhadap Pasar Minyak Dan Gas Rusia Di Uni Eropa. *Skripsi Fisip Lulusan Tahun 2021*.
- Lukman, M. Z. (2022). *Potensi Indonesia Pasca-Reformasi Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Perbandingan Kebijakan Luar Negeri)= Indonesia's Potential Post-Reform As A Non-Permanent Member Of The United Nations Security Council (The Comparative Study Of Foreign Policy)* Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.
- Malaysia, P. A. I. D. (2019). Laporan Akhir Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi.
- Mhd, N. (2023). *Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Konflik Rusia-Ukraina* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Ramadhanti, Shabrina. *Kepentingan Rusia Dalam Kerjasama Militer Dengan Pakistan Periode 2014-2017*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rohdianti, S. A. *Implementasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Proliferasi Nuklir Di Iran Pada Era Donald Trump Periode 2018-2019* (Bachelor's thesis, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).